



BAGAIMANA INDONESIA DAPAT MEMILIKI SISTEM PENGADAAN YANG LEBIH TRANSPARAN?

KONTRAK TERBUKA DAN MASA DEPAN SISTEM PENGADAAN INDONESIA



CATATAN PENELITIAN

1. Kenapa kontrak harus lebih transparan

Pemerintah menghabiskan sekitar USD 9,5 triliun per tahun melalui kontrak publik¹, tetapi hanya sedikit informasi yang tersedia secara publik mengenai bagaimana, kapan, dan di mana uang ini digunakan. Standar Data Kontrak Terbuka (OCDS)² telah dikembangkan untuk memberikan spesifikasi dan pedoman yang kuat bagi publikasi data pengadaan dan dokumen secara efektif: membuat informasi tentang keseluruhan proses kontrak tersedia untuk berbagai pengguna, termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS) dan perusahaan swasta. Melalui pengungkapan data yang sudah ditingkatkan dan distandarisasi, publikasi data dalam format OCDS dapat memberikan kontribusi untuk sistem yang lebih adil dari kontrak pemerintah, memberikan hasil yang lebih baik untuk uang yang dikeluarkan dan proses pengadaan yang lebih kompetitif, serta juga mendukung pengawasan pengadaan untuk memperkuat transparansi pemerintah, akuntabilitas, dan penanggapan.

Di Indonesia, pengadaan barang dan jasa atas nama lembaga pemerintah menyumbang sekitar 30% dari anggaran nasional negara (MCA, 2014). Diperkirakan bahwa 60% dari bantuan pembangunan luar negeri digunakan untuk pengadaan barang dan jasa (Buehler, 2012). Akan tetapi, sistem pengadaan publik di Indonesia sering dirusak dengan inefisiensi serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang menimbulkan kerugian sebesar kurang lebih \$ 15 miliar per tahun (MCA, 2014).

Reformasi pengadaan yang diprakarsai oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi inefisiensi ini. Pengadaan publik sudah mengalami reformasi yang komprehensif sejak tahun 2003, setelah mengadopsi Keputusan Presiden Nomor 80/2003, dan diikuti oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2010 pada tahun 2010. Alhasil, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) didirikan pada tahun 2007. Sejak tahun 2012, ULP telah diberi amanat untuk mengadopsi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Reformasi ini memberikan dasar untuk mengadopsi potensi praktek kontrak terbuka yang lebih baik, dan pelaksanaan OCDS untuk mendorong pengungkapan yang berkualitas tinggi dan terstandarisasi dari meningkatkan jumlah data pengadaan yang sedang dikumpulkan.

Penghargaan: Catatan penelitian yang ditulis oleh Michael Canares, Glenn Maail, dan Andreas Pawelke ini adalah versi singkat dari penelitian yang diadakan oleh Open Data Lab Jakarta - Web Foundation (Jakarta Lab) dengan dukungan dari HIVOS.

Catatan Penelitian ini pertama kali diterbitkan pada tanggal 15 April 2016.

¹ Lihat: <http://standard.open-contracting.org/latest/en/>

² OCDS versi 1.0 dikembangkan oleh World Wide Web Foundation, dengan dukungan dari Omidyar Network dan Bank Dunia, sebagai produk utama dari Open Contracting Partnership (OCP). OCP didirikan untuk membuat informasi kontrak tersedia, mudah diakses, dan berguna bagi masyarakat sipil, pemerintah, dan perusahaan. Kunjungi website OCDS di <http://standard.open-contracting.org/>, dan situs OCP di <http://www.open-contracting.org/>

2. Target penelitian kami

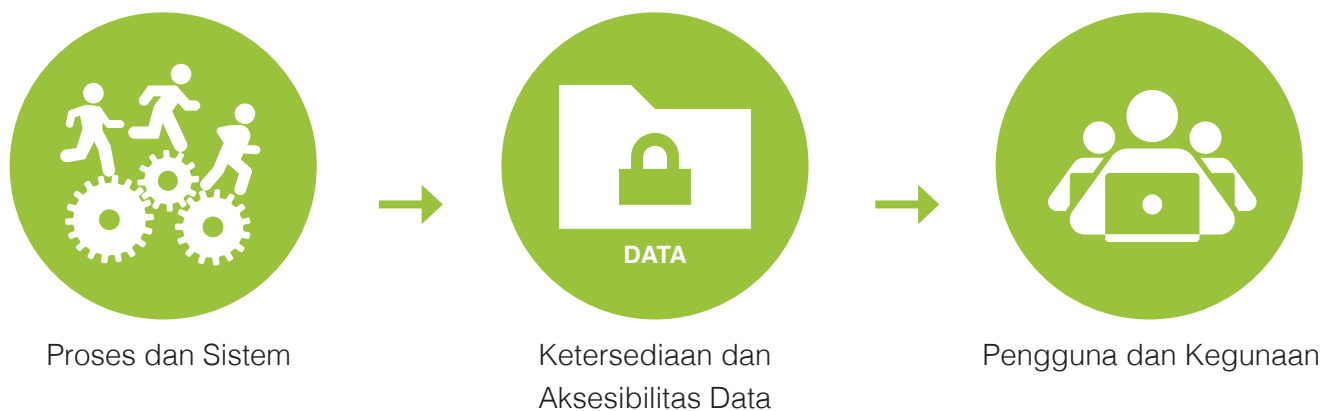
Penelitian yang dilakukan oleh Open Data Lab Jakarta – Web Foundation ini mengkaji kesiapan pelaksanaan OCDS di Indonesia. Kapasitas para pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta dilihat secara lebih seksama. Penilaian juga dimaksudkan untuk mengkaji tingkat kepentingan untuk penerapan kontrak terbuka dan OCDS di Indonesia, serta tantangan dan peluang dalam melakukan hal yang sama.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran untuk mendapatkan setidaknya tiga tingkatan informasi - data, proses, dan masyarakat – serta menggunakan triangulasi sumber informasi untuk memvalidasi temuan pada setiap tingkat. Pemahaman mengenai siklus kontrak membutuhkan pemahaman mengenai antarmuka dalam ketiga faktor ini untuk memahami proses yang terjadi, pihak yang bertanggung jawab dalam membuat ini terjadi, dan jenis data yang dihasilkan.

Komponen proses memetakan lanskap *e-procurement* di Indonesia saat ini, serta mengakui pentingnya sistem pengadaan digital bagi pengadopsian OCDS secara efektif. Dengan memanfaatkan tinjauan pustaka, kami mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam penerapan e-procurement, yang kemudian dikaji dalam bagian selanjutnya dari makalah ini.

Komponen data mengkaji karakteristik *dataset* pengadaan saat ini, dan melakukan analisis jaringan sosial untuk melihat hubungan antar *dataset*. Penilaian tingkat lapangan rinci terhadap OCDS telah dilakukan.

Komponen masyarakat mengacu pada *Focus Group Discussion* (FGD) dan Wawancara Tokoh Kunci (KII) dengan individu yang terlibat dalam siklus pengadaan dalam pemerintahan, dan dengan para pengguna data pengadaan (dipilih berdasarkan analisis pemangku kepentingan). Kepentingan publik dalam kontrak dan informasi yang terkait dengan pengadaan dikaji menggunakan analisis media terhadap surat kabar harian nasional terkemuka.



Gambar 1. Kerangka metodologi umum

3 Analisis jaringan sosial meneliti struktur sosial serta jaringan masyarakat dan interkoneksi mereka. Untuk penelitian ini, kami menganalisis hubungan dari lembaga pemerintah dan penawar yang terlibat dalam data kontrak selama periode Maret-Juli 2014 di provinsi DKI Jakarta. Dalam istilah awam, hal ini mengacu pada jumlah kontrak yang diterima pemasok dari lembaga pemerintah.

3. Hasil temuan kami

PENGUNGKAPAN PUBLIK ATAS INFORMASI KONTRAK MEMERLUKAN PERBAIKAN

Tabel di bawah menunjukkan enam tahap inti dalam proses kontrak publik di Indonesia, serta ketersediaan data dan tantangan potensial dalam pengadopsian OCDS.

Tahapan	Proses	Ketersediaan data	Tantangan Potensial
1 Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempersiapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) PA/KPA mengunggah RUP dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Publik (SiRUP) 	Hanya RUP yang tersedia dalam SiRUP tanpa menyertakan tautan ke dokumen asli	<i>Link</i> lemah ke proses anggaran karena perencanaan pengadaan tidak diikutsertakan dalam proses anggaran
2 Pengumuman	<ul style="list-style-type: none"> Unit Layanan Pengadaan (ULP) menciptakan paket <i>e-tender</i> dalam sistem pengadaan <i>online</i> yang disebut SPSE Vendor yang terdaftar dalam SPSE mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai paket <i>e-tender</i> atau menyampaikan tawaran 	Pengguna terdaftar hanya dapat melihat paket <i>e-tender</i>	Tidak semua pengadaan dilakukan melalui <i>platform e-procurement</i> . Ada juga proses <i>offline</i> yang terjadi dan bervariasi dalam data yang mereka kumpulkan dan bagikan
3 Seleksi	<ul style="list-style-type: none"> ULP mengunduh dokumen penawaran dari SPSE dan menafsirkan dokumen penawaran Kelompok Kerja (POKJA) ULP melakukan evaluasi administrasi (akurasi, kecukupan) 	Hanya lembar evaluasi tender dan surat pemenang tender yang tersedia secara <i>online</i> . Tidak mencantumkan tautan ke dokumen asli.	<i>Lihat Tahap 2 Tantangan Potensial</i>

3. Hasil temuan kami

Tahapan	Proses	Ketersediaan data	Tantangan Potensial
4 Penghargaan	<ul style="list-style-type: none"> Jika sebuah penawaran dipilih sebagai pemenang, ULP menyiapkan proposal kepada PA/KPA jika barang dan jasa yang dibeli bernilai lebih dari 10 miliar rupiah (sekitar USD 692.000). Jika PA/KPA setuju, ULP akan mengumumkan hasilnya. Jika PA / KPA tidak setuju, mereka akan memberi instruksi kepada UPS untuk kembali mengevaluasi tawaran atau untuk menyatakan bahwa proses lelang gagal ULP mengumumkan hasil lelang untuk barang atau jasa di bawah ambang batas ini Kontrak diberikan kepada pemenang lelang 	Surat kontrak dan kontrak tidak diungkapkan kepada publik	Proses <i>online</i> dan <i>offline</i> bervariasi. Beberapa lembaga menggunakan sistem yang berbeda untuk penunjukan langsung
5 Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> Pemasok melaksanakan komitmen berdasarkan kontrak Pemerintah memantau tingkat kepatuhan pemasok terhadap persyaratan kontrak 	Tidak ada informasi dalam sistem tender yang mengungkapkan data kinerja (mis. bagaimana kontraktor menyampaikan hasil kerja kontrak) secara proaktif	Informasi terbatas yang ditangkap pada tingkat proses kontrak dalam sistem digital, meskipun Monev Online merangkum keseluruhan kegiatan kontrak
6 Pemutusan	Kontrak berakhir, mis. dengan selesainya kontrak kerja, atau kegagalan untuk mematuhi dan memenuhi kontrak	Tidak ada data yang tersedia dalam sistem tender yang mengungkapkan data tentang pemutusan kontrak	Informasi yang tercantum dalam sistem digital masih terbatas

Tabel 1. Siklus hidup kontrak dan ketersediaan data di Indonesia

3. Hasil temuan kami

Pada umumnya, sistem *e-procurement* di Indonesia mencerminkan proses kontrak yang dijabarkan di dalam OCDS, tetapi sebagian besar dokumen tidak dipublikasikan secara *online*. Dokumen-dokumen yang dipublikasikan tidak berisi tautan ke dokumen asli dan dalam proses kontrak yang sangat penting, seperti kinerja dan pemutusan, tidak ada dokumen atau data yang tersedia secara publik. Akan tetapi, ada cakupan yang memadai untuk meningkatkan pengungkapan informasi kepada publik mengenai proses dan kinerja pengadaan di Indonesia sebagai data terbuka. Misalnya, Monev Online⁴ adalah situs milik pemerintah yang dimiliki dan dikelola oleh LKPP, dan ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi profil pengadaan. Situs ini menunjukkan status, perkembangan, serta realisasi pengeluaran dan anggaran, misalnya, dengan menampilkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual. Oleh karena itu, data kinerja siap dipublikasikan sebagai data terbuka.

OCDS dapat memberikan model yang efektif untuk menyatukan data dari proses *online* dan *offline*, serta mengenali berbagai tingkat rincian yang dapat diungkapkan untuk setiap kasus. Namun, harus diingat bahwa proses yang dijabarkan di atas belum mencakup kegiatan pengadaan oleh badan usaha milik negara, serta pengadaan infrastruktur. Sebagai contoh, walaupun Peraturan Presiden berlaku untuk semua tingkat pemerintahan, pengadaan oleh perusahaan energi milik negara, Pertamina, masih diatur oleh UU tentang Badan Usaha Milik Negara. Demikian juga, Kementerian Pekerjaan Umum (KPU) menjalankan sistem pengadaan terpisah di bawah UU mengenai konstruksi (Yulianto & Taeyeon, 2011). Inisiatif Pemerintah Indonesia saat ini dalam mengkonsolidasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan memberi kesempatan untuk menyertakan OCDS ke dalam kerangka hukum nasional untuk reformasi pengadaan.

KAPASITAS TEKNIS MEMBUTUHKAN INVESTASI YANG SIGNIFIKAN

Pada tingkat kebijakan, ada kepemimpinan tingkat tinggi yang kuat dalam reformasi pengadaan pada tingkat nasional, sebagian besar diundangkan melalui Keputusan Presiden. Undang-undang pengadaan umum, yang akan menggabungkan berbagai peraturan pengadaan di negara ini, sedang disiapkan. Dana sebesar Rp 14 triliun, atau USD 1,2 miliar, sudah dialokasikan pada tahun 2015 untuk integrasi sistem *e-government* di Indonesia, dan jumlah ini juga mencakup proses kontrak.⁵

Lembaga nasional, LKPP, yang sudah beralih ke teknologi, memiliki divisi IT yang tengah mengembangkan sistem *e-procurement*, dan walaupun sebagian besar Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdesentralisasi menggunakan aplikasi ini, mereka menerapkannya secara lokal dan mungkin tidak memiliki semua *front-end online*. Beberapa LPSE telah mengembangkan sistem terpisah tambahan untuk penunjukan pemenang kontrak non-kompetitif dan pelaporan kinerja. Secara keseluruhan, LPSE memiliki kapasitas teknis terbatas, dan pengenalan fungsi OCDS dalam SPSE memerlukan rencana

⁴ Kunjungi Monev Online di <http://monev.lkpp.go.id/>

⁵ Lihat: <http://www.antaraneews.com/en/news/96803/process-of-procuring-goods-and-services-to-be-streamlined-jokowi>

3. Hasil temuan kami

jangka panjang, baik untuk mengenalkan pengkinian fungsi, dan harmonisasi standar serta sistem klasifikasi antar implementasi SPSE.

Penggunaan *software* SPSE umum oleh lembaga pengadaan memberikan jalan bagi pengungkapan OCDS sebagai pilihan standar untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Akan tetapi, sistem yang bersifat terdistribusi, dengan lebih dari 600 implementasi di tingkat lokal yang berbeda, serta isu-isu konektivitas dan infrastruktur digital, mengindikasikan bahwa rencana jangka panjang diperlukan untuk pengenalan OCDS, dan melalui penawaran dukungan yang luas, atau kemitraan strategis yang kuat dengan LKPP untuk mendukung pelaksanaan. Alternatif lainnya adalah pendekatan bertahap, untuk mendapatkan akses ke API yang ada ke SPSE, dan mengkonversi data ke OCDS dengan menggunakan kode eksternal, satu per satu melalui ULP sesuai dengan daftar prioritas strategis.

PENGADAAN DI INDONESIA DAPAT BERALIH KE OCDS

Analisis atas data yang diterbitkan oleh SPSE mengungkapkan bahwa informasi untuk memenuhi tingkatan dasar OCDS telah tersedia. Bidang yang dapat digunakan untuk menghasilkan tanda pengenal proses kontrak sudah dapat diakses, sehingga memudahkan publikasi yang didistribusikan dan agregasi informasi. Hal ini berkaitan dengan rangkaian pola publikasi OCDS, yang menjabarkan bidang dan dokumen yang perlu diungkapkan pada tingkat dasar, menengah, dan lanjutan. Penjelasan mengenai tingkatan publikasi dijelaskan dalam kotak di bawah.

Tingkatan	Data	Dokumen
Dasar	Mensyaratkan agar hal-hal berikut dipublikasikan: nama dan alamat pembeli; tanda pengenal, judul, deskripsi, status, metode pengadaan, periode lelang, deskripsi dan jumlah barang, dokumen yang terkait dengan lelang; tanda pengenal, judul, deskripsi, tanggal, nilai penunjukan pemenang; nama dan alamat pemasok yang dipilih; tanda pengenal, judul, status, periode, nilai kontrak, deskripsi dan jumlah barang	Mensyaratkan agar hal-hal berikut dipublikasikan: pemberitahuan penunjukan pemenang, pemberitahuan kontrak, sertifikat penyelesaian, rencana pengadaan, pemberitahuan lelang, dokumen penawaran, spesifikasi teknis, kriteria evaluasi
Menengah	Mensyaratkan publikasi yang disebut di atas serta hal-hal berikut: tanda pengenal organisasi untuk pembeli dan pemasok; klasifikasi rinci mengenai <i>line item</i> dalam lelang,	Mensyaratkan publikasi yang disebut di atas ditambah dengan laporan evaluasi, teks kontrak, kontrak yang ditandatangani, <i>milestones</i> pelaksanaan, laporan

3. Hasil temuan kami

Tingkatan	Data	Dokumen
	penunjukan pemenang dan kontrak; informasi perencanaan termasuk rincian anggaran dan dokumen terkait; kriteria penunjukan pemenang lelang, nilai-nilai yang diperkirakan dan informasi pengajuan; permintaan lelang rincian periode; rincian jumlah dan daftar nama mereka; dokumen kontrak; tanda tangan kontrak; informasi dan tanggal <i>milestone</i> pelaksanaan kontrak; dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak.	perkembangan fisik, laporan perkembangan keuangan, audit akhir, pemberitahuan sidang umum, penelitian pasar, kriteria kelayakan, klarifikasi atas pertanyaan penawar, perusahaan terpilih (<i>shortlisted</i>)
Lanjutan	Mensyaratkan publikasi yang disebut di atas disertai dengan hal-hal berikut ini: informasi terstruktur mengenai <i>milestones</i> proyek pada tahap lelang; informasi <i>milestone</i> yang diperbarui secara berkala selama pelaksanaan kontrak; rincian informasi mengenai unit, kuantitas dan biaya untuk <i>line item</i> pada tahap lelang, penunjukan pemenang dan pembuatan kontrak; tanda pengenal untuk setiap organisasi yang berpartisipasi dalam lelang; informasi mengenai transaksi pengeluaran kepada pemasok selama pelaksanaan kontrak.	Mensyaratkan publikasi yang disebut di atas, disertai dengan tawaran yang memenangkan lelang, keluhan dan keputusan, lampiran kontrak, jaminan, sub-kontrak, dampak lingkungan, penilaian aset dan kewajiban pemerintah, penilaian kebutuhan, studi kelayakan, rencana proyek, manajemen risiko dan kewajiban proyek, <i>bill of quantity</i> , informasi mengenai para penawar, konflik kepentingan yang ditemukan, penghindaran (<i>debarments</i>) yang terjadi.

Kotak 1. Tingkatan Publikasi di OCDS

Indonesia dapat beralih ke OCDS pada tingkat dasar dengan memublikasikan semua dokumen dan kontrak yang disyaratkan (lihat Kotak 1). Persyaratan pada tingkat dasar adalah agar dokumen tersedia untuk dipublikasikan, tetapi beberapa di antaranya tidak diungkapkan kepada publik atau secara proaktif (misalnya kriteria evaluasi). Agar dapat beralih ke publikasi tingkat menengah dan lanjutan, kebijakan dan advokasi memastikan publikasi *data fields* tambahan dan dokumen yang disyaratkan. Selain itu, peta yang menerjemahkan data SPSE ke dalam struktur OCDS akan bermanfaat untuk pendekatan pengembangan teknis dan proses di masa depan. Yang terakhir, dorongan untuk menerapkan praktek lisensi terbuka eksplisit terhadap data dan dokumen merupakan hal penting bagi pelaksanaan OCDS secara penuh.

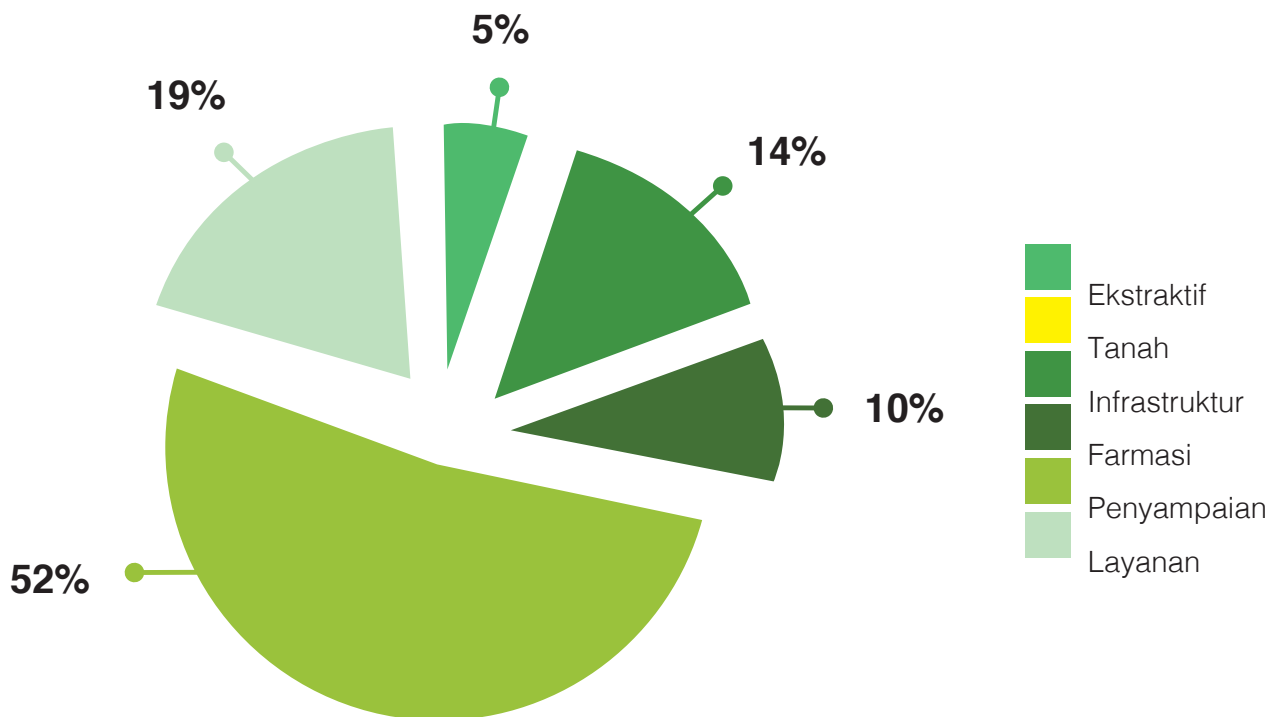
3. Hasil temuan kami

Sifat publikasi juga penting. OCDS menggunakan model 5-bintang⁶, di mana pada langkah yang paling awal (1 bintang) pemerintah mengunggah informasi kontrak terbuka dasar ke situs, dalam semua format yang tersedia saat ini. Upaya yang melampaui ini berarti membuat data tersedia secara *online* di bawah lisensi terbuka, seperti Creative Commons, dan lebih baik dalam bentuk data terstruktur, seperti Excel, daripada dalam bentuk scan gambar datar atau PDF, sebagai fitur dasar.

PENGGUNA MENUNJUKKAN KETERTARIKAN YANG TINGGI TERHADAP INFORMASI KONTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi enam kategori utama pemangku utama yang memiliki kepentingan dengan data pengadaan:

- Pemerintah sendiri;
- Akademi (termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pusat-pusat pelatihan);
- Organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi pengawas dan advokasi);
- Lembaga swadaya masyarakat internasional (termasuk donor);
- Media;
- Perusahaan.



Gambar 2. Data sektoral yang menarik minat pengguna

⁶ Model data terbuka bintang lima yang disarankan oleh penemu Web, Sir Tim Berners-Lee, dapat dilihat di <http://5stardata.info/en/>. Pemetaan OCDS terhadap model bintang lima dapat dilihat di <http://standard.open-contracting.org/latest/en/implementation/levels/>

3. Hasil temuan kami

Dalam survei *online* kami terhadap 21 calon pengguna, ketertarikan paling besar ditunjukkan kepada lelang di masa depan, dan rencana pengadaan, diikuti oleh rincian mengenai pihak yang memberikan penawaran, dan memenangkan lelang, dan yang terakhir, rincian dari kontrak yang disepakati. Hal ini dikonfirmasi oleh enam informan utama, empat dari masyarakat sipil, dan dua dari sektor swasta.

Sebagian besar responden tertarik pada data yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan publik. Hal ini mencakup, antara lain, pengadaan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Di antara pihak-pihak yang disurvei, hampir tidak ada yang menunjukkan ketertarikan terhadap data tanah. Di antara mereka yang memilih “lainnya” dalam jawaban, salah satu responden menunjukkan ketertarikan terhadap data yang terkait dengan penanggulangan bencana; responden lainnya tidak merinci apa yang menjadi fokus ketertarikan mereka.

OMS dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional, pada umumnya tertarik untuk memantau proses pengadaan, dan menggunakan data untuk advokasi reformasi. Hal ini mencakup peningkatan transparansi pemerintah khususnya terkait masalah anggaran dan pengeluaran, dan ruang untuk meningkatkan partisipasi warga, misalnya di mana OMS diberi akses terhadap data komprehensif mengenai pengadaan di daerah kebijakan tertentu.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang kami temui memiliki kebutuhan spesifik terhadap sektor tertentu, dan rasa ingin tahu yang kuat, khususnya mengenai kontrak ekstraktif, yang tidak dikelola dalam sistem pengadaan publik. Kegiatan pengadaan sektor ekstraktif saat ini dilakukan melalui sistem mereka sendiri, dikarenakan oleh struktur hukum yang rumit di Indonesia, di mana hukum mengenai badan usaha milik negara termasuk dalam sektor minyak dan energi, mendahului dan mengalahkan keputusan presiden yang memandatkan kepatuhan terhadap *e-procurement*. OMS lainnya telah menyampaikan minat spesifik dalam tahap pelaksanaan kontrak dan mencari *milestone* dan data pelaporan proyek, yang saat ini belum tercatat dalam sebagian besar sistem *e-procurement*.

Perusahaan-perusahaan tertarik pada data yang memungkinkan partisipasi dalam proses penawaran, sehingga dapat menurunkan biaya pencarian peluang pengadaan saat ini. Pengguna dari sektor akademik tertarik untuk mengukur kinerja lembaga pemerintah. Pengguna media berfokus pada data yang digunakan untuk pelaporan investigatif.

Saat ini, pengguna OMS saat ini mengakses data pengadaan dengan memanfaatkan UU Kebebasan Informasi (FOIA) dan mengirimkan permintaan kepada badan-badan pemerintah tertentu, informasi pembelian, dan melalui pengaturan khusus dengan LKPP.

Pengguna perusahaan berfokus pada pemantauan sistem SPSE yang menarik bagi mereka. Dalam sistem terdistribusi saat ini, perusahaan harus secara rutin mengunjungi situs LPSE yang didistribusikan untuk menemukan peluang kewirausahaan di sektor atau kota yang ditargetkan secara spesifik, atau

3. Hasil temuan kami

melalui INAPROC⁷, portal yang baru saja diluncurkan oleh LKPP yang menggabungkan data LPSE yang disampaikan. Akan tetapi, tidak seperti kasus di beberapa negara lain, belum ada pasar dari pihak ketiga yang menyediakan layanan pemberitahuan kesempatan lelang.

Analisis kami menunjukkan bahwa media sangat berfokus pada isu-isu mengenai pelaksanaan *e-procurement* dan kompleksitas pengadaan, serta peliputan kasus korupsi potensial, terutama yang berkaitan dengan pembengkakan anggaran dan penambahan anggaran. Media pada umumnya meliput isu-isu pengadaan di tingkat nasional, dan hanya sedikit meliput berita mengenai kasus pengadaan lokal.

PENGGUNA MENGALAMI HAMBATAN SIGNIFIKAN DALAM MENGAKSES

Pengguna yang berpartisipasi dalam penelitian ini menghadapi sejumlah tantangan dalam mengakses dan menggunakan data pengadaan, yang dirangkum dalam tabel di bawah.

	Tantangan Akses	Faktor Pembatas
Hambatan teknis	<ul style="list-style-type: none">Kecepatan <i>Internet dan server downtime</i>Kurangnya standarisasi<i>Access-control</i> (Diperlukan <i>log-in</i> atau persetujuan terlebih dahulu)Pembatasan akses ke dokumen⁸	<ul style="list-style-type: none">Format dokumenUkuran dokumenVolume dokumen (Ada ribuan paket pengadaan setiap tahun)
Tantangan Hukum/ Politik	<ul style="list-style-type: none">Kerahasiaan dokumenRespons yang lambat terhadap permintaan FOIA	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya data historisPenyediaan informasi lampiran yang selektif
Tantangan kapasitas (sumber daya manusia & kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya pengetahuan mengenai sistem pengadaanTingginya biaya untuk mengakses informasi	<ul style="list-style-type: none">Rendahnya penggunaan sistem <i>online</i>Bahasa yang tidak dapat diakses

Tabel 2. Tantangan yang dihadapi oleh calon pengguna data kontrak

⁷ The INAPROC website is available at <https://inaproc.lkpp.go.id/>

⁸ Dokumen tender memiliki bagian yang dipublikasikan untuk umum, dan informasi yang dirahasiakan biasanya dibatasi aksesnya. Di sisi lain, dokumen kontrak tidak tersedia untuk umum, walaupun mungkin bisa diakses melalui saluran permintaan FOIA. Pembatasan ini adalah efek dari berbagai penafsiran undang-undang Indonesia saat ini, di mana tidak ada pernyataan khusus yang menyatakan bahwa semua informasi atau dokumen kontrak harus dipublikasikan.

4. Bagaimana kontrak bisa dibuat menjadi lebih transparan?

Untuk mewujudkan manfaat dari data Kontrak Terbuka, diperlukan upaya-upaya dalam berbagai bidang yang terangkum dalam tabel di bawah ini.

Dalam Jangka Pendek	Dalam Jangka Menengah
<p>(a) Menerapkan kebijakan baru untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang ada saat ini dipublikasikan secara lebih proaktif. Hambatan yang saat ini mencegah publikasi yang lebih luas perlu dikaji lebih lanjut dalam membuat strategi di area ini. Dukungan kepada advokasi lokal mungkin bermanfaat dalam meningkatkan kuantitas pengadaan yang disalurkan melalui platform e-procurement, misalnya menggunakan data Monev Online yang ada untuk mendukung ini.</p>	<p>(e) Mengembangkan platform dari lapisan data broker. Hal ini akan memudahkan konversi data SPSE ke OCDS, atau sekedar untuk memantau data yang diterbitkan SPSE dan kemiripan dengan format OCDS dan kemudian mengkonversinya ke format yang berbeda untuk kelompok pengguna yang berbeda.</p>
<p>(b) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil untuk memublikasikan dan menggunakan data kontrak terbuka. Ada kesenjangan kapasitas di pihak pemerintah dalam menyelaraskan praktek-praktek publikasi terkait persyaratan OCDS yang dapat diatasi melalui pelatihan dan pemantauan. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil perlu dilatih mengenai seluk-beluk hukum pengadaan dan prosesnya serta cara mengakses dan menganalisis data dari sistem.</p>	<p>(f) Memperkenalkan atau meningkatkan 'tool-building'. Hal ini mengacu pada kerja sama dengan komunitas global pengembang piranti data terbuka yang semakin berkembang dalam OCDS untuk mengidentifikasi, melokalisasi atau membuat alat untuk memenuhi kebutuhan informasi kontrak OMS, termasuk alat-alat untuk memantau peluang lelang baru dengan lebih mudah, dan melacak proyek pengadaan yang sedang berlangsung.</p>
<p>(c) Diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami kontrak terbuka dalam konteks sub-nasional. Hal ini terkait langsung dengan mencari cara terbaik untuk memastikan adanya sistem pengadaan yang transparan dan berterima di tingkat lokal.</p>	
<p>(d) Memastikan dokumentasi data yang tersedia, dan memberikan dukungan kepada calon pengguna. Pekerjaan terkait item (e) dan (f) pada kolom jangka menengah membutuhkan dokumentasi data yang tersedia</p>	

4. Bagaimana kontrak dapat dibuat menjadi lebih transparan?

Dalam Jangka Pendek	Dalam Jangka Menengah
saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengembangan <i>platform</i> dan pembuatan <i>tools</i> yang relevan. Pemberian dukungan kepada calon pengguna data kontraktor juga penting dan hal ini bisa berupa peningkatan kapasitas, seperti yang dibahas dalam (b) di atas, atau dalam strategi keterlibatan pengguna lain dalam bentuk <i>data dives</i> atau <i>hackathons</i> khusus pengadaan dengan dukungan inkubasi.	

Tabel 3. Rekomendasi Lab Jakarta untuk proses kontrak terbuka yang lebih transparan di Indonesia

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai catatan penilaian ini, kunjungi situs kami di labs.webfoundation.org atau hubungi kami secara langsung di info@labs.webfoundation.org. Media lain yang terkait atau serupa juga dapat dilihat pada bagian sumber pada situs kami.

➤ Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai proyek ini, email kami di info@labs.webfoundation.org

➤ Jika Anda ingin melihat proyek data terbuka lainnya, kunjungi labs.webfoundation.org

➤ Jika Anda ingin membahas hasil temua secara lebih rinci, hubungi kami!

World Wide Web Foundation

 webfoundation.org

 [@webfoundation](https://twitter.com/webfoundation)

 contact@webfoundation.org

Open Data Lab Jakarta

 labs.webfoundation.org

 [@ODLabJkt](https://twitter.com/ODLabJkt)

 info@labs.webfoundation.org

HIVOS

 hivos.org

 [@hivosorg](https://twitter.com/hivosorg)

 info@hivos.nl

